

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA KEJAKSAAN
TINGGI RIAU DI PEKANBARU**

SKRIPSI



OLEH

PUTRI MAYASARI

125310709

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

JalanKaharuddinNasution No. 113 PerhentianMarpoyan
Telp.(0761) 674674 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru-28284

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : PUTRI MAYASARI
NPM : 125310709
FAKULTAS : EKONOMI
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI (S1)
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
PADA KEJAKSAAN TINGGI RIAU DI PEKANBARU

DISETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Firdaus, AR, SE, M.Si, Ak, CA


Burhanuddin, SE, M.Si

MENGETAHUI

DEKAN


Dr. H. Abrar, M.Si, Ak, CA

KETUA PRODI


EnyWahyuningsih, SE, M.Si, Ak, CA



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru-28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PUTRI MAYASARI
NPM : 125310709
FAKULTAS : EKONOMI
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI (S1)
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
PADA KEJAKSAAN TINGGI RIAU DI PEKANBARU

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

Dr. Firdaus AR, SE, M.Si, Ak,CA

PEMBIMBING II

Burhanuddin SE, M.Si

Mengetahui :

DEKAN

Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA

KETUA JURUSAN

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si, CA



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 PerhentianMarpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru-28284




LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

NAMA : PUTRI MAYASARI
NPM : 125310709
FAKULTAS : EKONOMI
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI (S1)
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
PADA KEJAKSAAN TINGGI RIAU DI PEKANBARU

Disetujui Oleh :

Tim penguji

1. Dr. Kasman Arifin, SE., MM., Ak
2. Raja Ade Fitrasari M., SE., M. Acc
3. Dina Hidayat, SE., M. Si. Ak. CA

()
()
()

PEMBIMBING I



Dr. Firdaus AR, SE, M.Si, Ak.CA

PEMBIMBING II



Burhanuddin SE, M.Si

Mengetahui:

KETUA JURUSAN



Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si, CA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp.(0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru-28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

NAMA : Putri Mayasari

NPM : 125310709

PRODI : Akuntansi S1

FAKULTAS : Ekonomi

SPONSOR : Dr. Firdaus AR., SE., M.Si, Ak, CA

CO SPONSOR : Burhanuddin SE.,M.Si

JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Kejaksaan Tinggi
Riau Di Pekanbaru

Dengan Rincian Sebagai Berikut:

Tanggal	Catatan		Berita Acara	Paraf	
	Sponsor	Co Sponsor		Sponsor	Co sponsor
30/6/2016	x		- Perbaiki LBM		
7/10/2017	x		- Perbaiki LBM		
1/11/2017	x		- Perbaiki LBM		
19/11/2017	x		- Perbaiki LBM, Telaah Pustaka & Metode Penelitian		
27/11/2017	x		- Perbaiki catatan		
30/11/2017	x		- Lanjut ke PB 2		
7/12/2017		x	- LBM, permasalahan nya - Rumusan		

			- Penulisannya - Catatan kaki - Lanjut PB 1		
18/12/2017	x		- ACC Seminar Proposal		
14/2/2019	x		- Perbaiki LBM, jumpai saya dulu		
25/2/2019	x		- Perbaiki sesuai catatan		
28/2/2019	x		- Perbaiki saran		
5/3/2019	x		- Lanjut PB 2		
5/3/2019		x	- Bab I (hal 1,2,3)		
6/3/2019		x	- Bab II (hal 8,9,10)		
7/3/2019		x	- Bab III (hal 21,22)		
8/3/2019		x	- Bab IV (hal 23,25)		
9/3/2019		x	- Bab V (hal 28,29)		
11/3/2019		x	- Lanjut ke PB I		
12/3/2019	x		- Acc seminar hasil		

Pekanbaru, 12 April 2019
Pembantu Dekan I





Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No:1997/Kpts/FE-UIR/2019, Tanggal 10 April 2019, Maka pada Hari Kamis 11 April 2019 di laksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2018/2019.

1. Nama : Putri Maya Sari
2. N P M : 125310709
3. Program Studi : Akuntansi S1
4. Judul skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Kejaksan Tinggi Riau di Pekanbaru
5. Tanggal ujian : 11 April 2019
6. Waktu ujian : 60 menit.
7. Tempat ujian : Ruang sidang meja hijau Fekon UIR
8. Lulus Yudicium/Nilai : *Lulus / (A)*
9. Keterangan lain : Aman dan lancar.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. Firdaus AR, SE, M.Si, Ak, CA
Wakil Dekan Bid. Akademis

Sekretaris



Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si, CA
Ketua Prodi Akt S1

Dosen penguji :

1. Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA. (.....)
2. Burhanuddin, SE., M.Si. (.....)
3. Dr. Kasman Arifin ZA, SE., MM., Ak. (.....)
4. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA. (.....)
5. Raja Ade Fitrasari Mochtar, SE., M.Acc., Ak. (.....)

Saksi

1. Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA. (.....)

Pekanbaru, 11 April 2019

Mengetahui
Dekan,



Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647


BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Putri Maya Sari
NPM : 125310709
Program Studi : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru
Hari/Tanggal : Kamis / 11 April 2019
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Firdaus AR, SE.,M.Si.,Ak.,CA		
2	Burhanuddin, SE., M.Si		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Kasman Arifin ZA, SE., MM.,Ak.		
2	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA.		
3	R. Ade Fitrasari M., SE., M.Acc., Ak.		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai _____)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 60)
3. Tidak Lulus (Total Nilai _____)

Mengetahui
An.Dekan



Dr.Firdaus AR,SE.M.Si.Ak.CA
Wakil Dekan I

Pekanbaru, 11 April 2019
Ketua Prodi



Dra.Eny Wahyuningsih,M.Si.CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Putri Mayasari
 NPM : 125310709
 Judul Proposal : Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kejaksaan Tinggi Riau.
 Pembimbing : 1.Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak, CA
 2.Burhanuddin, SE., M.Si
 Hari/Tanggal Seminar : Sabtu 10 Maret 2018

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

- 1.Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
- 2.Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
- 3.Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
- 4.Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
- 5.Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
- 6.Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
- 7.Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
- 8.Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
- 9.Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
- 10.Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
- 11.Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
- 12.Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
- 13.Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
- 14.Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Burhanuddin, SE., M.Si		1. 
2.	Dr.H.Zulhelmy, SE., M.Si.,Ak,CA		2. 
3.	Yusrawati, SE., M.Si		3. 
4.	Emkhad Arief, SE., M.Si., Ak.,CA		4. 
5.	Raja Ade Fitrasari M, SE., M.Acc		5. 
6.	Nina Nursida, SE., M.Acc		6. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
 An.Dekan Bidang Akademis


 Dr.Firdaus AR,SE.M.Si.Ak.CA



Pekanbaru, 10 Maret 2018
 Sekretaris,


 Dra.Eny Wahyuningsih,M.Si.CA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor), baik Universitas Islam Riau maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.



Pekanbaru, April 2019



PUTRI MAYASARI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA KEJAKSAAN TINGGI RIAU DI PEKANBARU

ABSTRAK

Oleh
Putri Mayasari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Penelitian ini dilakukan pada bagian keuangan Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara langsung dan dokumentasi atau memfotocopy laporan keuangan Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan membandingkan praktek dengan teori yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk disajikan dalam skripsi.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan akuntansi keuangan pada Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Kata Kunci : Analisis, Penerapan Akuntansi Keuangan;

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF FINANCIAL ACCOUNTING IN RIAU'S
HIGH PROSPERITY IN PEKANBARU**

ABSTRACT

**By
Putri Mayasari**

This study aims to determine the suitability of the Application of Financial Accounting at the Riau High Prosecutor's Office in Pekanbaru with generally accepted accounting principles.

This research was conducted in the financial section of the Riau High Prosecutor's Office in Pekanbaru. Types and sources of data are primary data and secondary data. Data collection techniques are by direct interviews and documentation or photocopying the financial statements of the Riau High Prosecutor's Office in Pekanbaru. In the preparation of this study, the authors used descriptive methods, namely by comparing practices with existing theories, then drawing a conclusion to be presented in the thesis.

From the results of this study it was concluded that the application of financial accounting at the Riau High Prosecutor's Office in Pekanbaru was not yet fully in accordance with generally accepted accounting principles.

Keywords : Analysis, Application Of Financial Accounting;



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T karena atas rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat islam yang telah memberikan kesehatan, kemudahan dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru”**.

Kemudian shalawat dan salam penulis haturkan untuk junjungan alam Baginda Nabi Muhammad S.A.W dengan mengucapkan Allahumma sholli'ala tsaidina Muhammad Wa'ala Ali Tsayyidina Muhammad, Assalamu'alaika Ya Rasulullah. Yang telah memberikan suri tauladan serta pengajarannya, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak Wakil Rektor I, II, III Universitas Islam Riau.
3. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan studi.
4. Bapak Wakil Dekan I, II, III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
5. Ibu Eny Wahyuningsih, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Firdaus, AR, SE, M.Si, Ak, CA selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan membagikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Burhanuddin, SE, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau khususnya pada Program Studi Akuntansi, yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan mengarahkan serta memberikan dorongan serta arahan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Kepala Tata Usaha dan Bapak/Ibu Karyawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis

menyelesaikan segala urusan administrasi mengenai keperluan penulis yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.

10. Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian serta memberikan informasi yang akurat dan respon yang sangat baik.
11. Kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda Edison dan Ibunda Riowati yang telah memberikan semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Riau.
12. Untuk keluarga ku Mauliade Risoni, SE., SH, Marza Edrio Putra, Andrenna Marissa, SE, dan Hamidah Nabilla, S.Ag yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis bermohon dan berdo'a kepada Allah yang maha kuasa semoga jasa baik mereka semua dibalas dengan rahmat dan pahala yang setimpal serta mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari Kesempurnaan, namun dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu, penulis sudah berupaya semaksimal mungkin mengerahkan tenaga dan pikiran penulis untuk membuat skripsi ini dengan sebaik mungkin. Setiap Bab per bab dalam skripsi ini Insya Allah sudah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan ketentuan sistematika yang telah ditetapkan oleh fakultas. Terlepas dari itu, kritik dan saran yang bersifat positif penulis harapkan dari semua pihak guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap kepada seluruh pihak yang bersangkutan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis dan umumnya untuk pembaca yang budiman. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 13 Maret 2019
Penulis,

PUTRI MAYASARI



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Akuntansi	9
B. Sistem Akuntansi	12
C. Akuntansi Pemerintahan	14
D. Hipotesis.....	20
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	21
B. Jenis dan Sumber Data	21
C. Teknik Pengumpulan Data	21
D. Teknik Analisis Data.....	22

BAB IV : GAMBARAN UMUM KEJAKSAAN TINGGI RIAU

A. Profil Kejaksaan Tinggi Riau.....	23
B. Tugas dan Fungsi Kejaksaan Tinggi Riau	24
C. Visi dan Misi Kejaksaan Tinggi Riau	25
D. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Riau.....	27

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Sistem Penerimaan Kas Dan Pengeluaran Kas Pada Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru.....	28
B. Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru.....	31
C. Laporan Keuangan Pada Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru.....	39

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA.....	43
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
V.1 Buku Kas Umum.....	31
V.2 Jurnal Penerimaan Kas.....	32
V.3 Jurnal Pengeluaran Kas.....	33
V.4 Buku Besar Kas.....	33
V.5 Buku Besar Pendapatan.....	33
V.6 Buku Besar Belanja Modal.....	34
V.7 Neraca Saldo.....	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
V.1 Proses Penerimaan Kas	29
V.2 Proses Pengeluaran Kas	30



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kejaksanaan Tinggi Riau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kejaksanaan Tinggi Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Kejaksanaan Tinggi Riau yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kejaksanaan Tinggi Riau. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2015 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau adalah 5 satuan kerja.

Kantor Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam menyusun laporan keuangan, Kejaksaan Tinggi Riau tidak menggunakan jurnal, postingan buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan laporan laba rugi. Akan tetapi Kejaksaan Tinggi Riau Pekanbaru menggunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Laporan Keuangan Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru belum disusun dan disajikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang berlaku umum di lingkungan pemerintahan. Adapun gambaran singkat Laporan Akuntansi Keuangan di Pemerintahan yaitu sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 15.685.242.401 atau mencapai 538,2 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 2.914.257.000. Realisasi Belanja Negara pada TA 2015

adalah sebesar Rp. 102.591.560.698 atau mencapai 92,14 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 102.591.560.698.

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015.

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 32.308.685.000 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 2.653.485.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.28.782.750.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 248.450.000; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 624.000.000. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 1.109.660.000; dan Rp. 31.871.525.000.

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 19.503.853.594. Sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 98.074.486.090. Sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 78.543.632.496. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 344.171.242 dan defisit sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 78.887.803.738.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp. 29.469.352.891 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 78.887.803.738 kemudian ditambah dengan koreksi-

koreksi senilai Rp. 49.123.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp. 227.438.985.450.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di lapangan, ditemukan bahwa yang menjadi salah satu permasalahan yang di hadapi Kejaksaan Tinggi Riau dalam menyusun laporan keuangannya adalah masih terdapatnya perbedaan persepsi dalam pemahaman pengelolaan akuntansi asset tetap, asset lancar, pengelolaan PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) Kejaksaan Tinggi Riau berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yang berupa pelaksanaan target PNB, pemasukan PNB yang berasal dari denda tilang, biaya lelang lebih besar dari nilai barang, barang bukti sudah mengalami penyusutan, dan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan anggaran, serta proses administrasi dalam pelelangan, selain itu perbedaan persepsi juga terdapat dalam hal penghapusan PNB hasil penegakan hukum oleh Kejaksaan

menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang memerlukan izin.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dalam hal ini penulis merumuskan suatu masalah sebagai berikut:

“Apakah Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kejaksaan Tinggi Riau Sudah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Yang Berlaku Umum?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi keuangan yang berlaku umum di Kejaksaan Tinggi Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Menambah wawasan penulis, untuk bidang ilmu akuntansi secara umum dan bidang akuntansi secara khususnya dimana penerapan akuntansi keuangan yang diterapkan di Kejaksaan Tinggi Riau.
- b. Bagi Kejaksaan Tinggi Riau hasil penelitian ini merupakan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan dalam penyempurnaan penerapan akuntansi keuangan.
- c. Menjadi bahan acuan bagi pihak lain yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian yang sama.



D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini terbagi ke dalam 6 (enam) bab dengan rincian masing-masing bab sebagai berikut:

- BAB I : Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II : Bab ini berisikan landasan teori yang menguraikan secara detail mengenai Pengertian Akuntansi, Sistem Akuntansi, Proses Pelaporan Keuangan, Sistem Akuntansi Pemerintah, dan lain-lain.
- BAB III : Bab ini mengenai lokasi penelitian, sumber dan jenis data, cara mengumpulkan data serta analisis data.
- BAB IV : Bab ini berisikan tentang gambaran umum perusahaan yang diteliti.
- BAB V : Bab ini berisikan hasil pembahasan penelitian yang dilakukan penelitian.
- BAB VI : Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran

. BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi berasal dari kata asing *accounting* yang artinya bila di terjemahkan ke dalam bahasa indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi digunakan di hampir seluruh kegiatan bisnis di seluruh dunia untuk mengambil keputusan sehingga disebut sebagai bahasa bisnis (Horngren Harrison, 2007:4).

Menurut Warren dkk (2006:10) Akuntansi adalah Suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

2. Fungsi Akuntansi

Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan satu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer / manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi.

3. Laporan Dasar Akuntansi

Pada dasarnya proses akuntansi akan membuat output laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan neraca pada suatu perusahaan atau organisasi lainnya. Pada suatu laporan akuntansi harus mencantumkan nama perusahaan, nama laporan, dan tanggal penyusunan atau jangka waktu laporan tersebut untuk memudahkan orang lain memahaminya. Laporan dapat bersifat periodik dan ada juga yang bersifat suatu waktu tertentu saja.

4. Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut Horngren Harrison (2007:54) bidang-bidang akuntansi antara lain:

a. Akuntansi keuangan

Bidang ini berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan berkala dari hasil pencatatan tersebut. Laporan ini yang disusun untuk kepentingan umum dan biasanya digunakan pemilik perusahaan untuk menilai prestasi manajer atau dipakai manajer sebagai pertanggungjawaban keuangan terhadap para pemegang saham. Hal penting dari akuntansi keuangan adalah adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan aturan-aturan yang harus digunakan di dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan ekstern. Dengan demikian diharapkan pemakai dan penyusun laporan keuangan dapat berkomunikasi melalui laporan

keuangan sebab meeka menggunakan acuan atau bahasa yang sama yaitu Standar Akuntansi Keuangan. Standar Akuntansi Keuangan mulai diterapkan di Indonesia tahun 1994 menggantikan Prinsip-Prinsip Akuntansi Indonesai 1984.

b. Auditing

Auditing adalah suatu proses pemeriksaan independen terhadap suatu laporan keuangan Tugas dan fungsi akuntan publik (auditor) dalam melaksanakan pemeriksaan yaitu memeriksa bukti-bukti yang mendukung catatan akuntansi dan laporan keuangan serta memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan yang diperiksa tersebut. Laporan keuangan dikatakan wajar kalau disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Sebenarnya bidang ilmu auditing ini merupakan disiplin tersendiri terpisah dari ilmu akuntansi namun auditing memiliki hubungan erat dengan akuntansi keuangan. Seorang auditor harus ahli dalam akuntansi keuangan, tanpa menguasai Standar Akuntansi Keuangan auditor tidak akan mampu menjalankan pemeriksaan.

c. Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Bidang ini terutama bersangkutan dengan biaya produksi pada perusahaan manufaktur Salah satu fungsi utama dari

akuntan biaya adalah mengumpulkan dan menafsirkan data biaya (baik yang sesungguhnya maupun biaya yang akan terjadi) bagi manajemen untuk tujuan pengendalian biaya dan perencanaan.

d. Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen (mencakup juga akuntansi biaya) menggunakan biaya historis dan biaya taksiran guna membantu manajemen di dalam menjalankan kegiatan dan perencanaan. Akuntansi manajemen sering kali dihadapkan pada masalah pemilihan berbagai alternatif tindakan dan membantu memilih alternatif yang paling baik yang harus diambil oleh pengelola perusahaan. Dalam akuntansi manajemen tidak dikenal suatu standar akuntansi manajemen, akuntan bebas menggunakan kreativitas dalam menyusun laporan akuntansi manajemen sesuai dengan kebutuhan dan keinginan manajemen.

e. Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan menekankan pada penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dan mempertimbangkan efek perpajakan dari suatu transaksi perusahaan atau alternative berbagai tindakan. Akuntan yang memilih spesialisasi ini harus memahami dan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Seorang akuntan perpajakan harus dapat memberi usulan pemilihan transaksi perusahaan yang mengakibatkan

beban pajak terkecil bagi perusahaan tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku (tax planning)

f. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah bidang yang menyangkut masalah perancangan prosedur, metode dan teknik untuk mencatat dan mengolah transaksi perusahaan. Akuntan yang mengkhususkan dalam bidang ini akan merancang system dan prosedur yang dapat melindungi kekayaan perusahaan dan menjamin dapat dipercaya laporan keuangan dengan biaya yang relatif murah. Prinsip dasar yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan sistem akuntansi adalah bahwa biaya penyusunan sistem harus lebih rendah daripada manfaat sistem tersebut. Sistem akuntansi yang baik harus aman, murah dan cepat.

g. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran menyajikan rencana kegiatan keuangan untuk suatu periode melalui catatan dan ikhtisar serta menyediakan data perbandingan antara kegiatan sesungguhnya dengan rencananya. Suatu kombinasi antara perencanaan dan pengendalian sering dianggap sebagai bagian dari akuntansi manajemen.

h. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan menekankan pada pencatatan dan pelaporan transaksi dari lembaga pemerintah atau lembaga social seperti rumah sakit, organisasi politik, masjid, sekolah dan lainnya. Suatu hal yang penting untuk diperhatikan dalam bidang ini adalah adanya peraturan perundangan yang mengikat unit-unit organisasi tersebut diatas. Sebagaimana dengan akuntansi keuangan dalam pelaksanaan akuntansi pemerintahan harus menggunakan standar akuntansi pemerintahan.

i. Akuntansi Sosial

Akuntansi sosial merupakan bidang terbaru dalam akuntansi dan sulit untuk dijelaskan dengan singkat. Ada kecenderungan dari masyarakat meminta profesi akuntan untuk mengukur biaya sosial dan manfaatnya yang sebetulnya dikatakan sulit untuk dilaksanakan. Salah satu tugas dari bidang ini misalnya mengukur pola kepadatan lalu lintas sebagai bagian dari studi penentuan pemakaian dana transportasi yang paling efisien tidak hanya menyangkut fasilitas perdagangan saja tetapi juga mempertimbangkan masalah lingkungan bagi masyarakat.

j. Tata buku dan Akuntan

Sering orang bingung membedakan istilah tata buku dan akuntansi. Hal ini terjadi karena memang keduanya berhubungan erat. Tata buku adalah

pencatatan data perusahaan dengan cara-cara tertentu. Pemegang buku mungkin bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan pencatatan dari suatu perusahaan atau mungkin hanya bertanggung jawab terhadap sebagian kecil pencatatan seperti pada masalah piutang atau utang saja. Sebagian besar pekerjaan dalam tata buku menyangkut masalah tulis menulis dan secara bertahap telah dapat dicapai dengan menggunakan computer. Akuntansi terutama bersangkutan dengan masalah perancangan system pencatatan, penyusunan laporan berdasarkan data yang dicatat dan penafsiran laporan.

Akuntan sering membimbing dan menilai pekerjaan penata buku, pekerjaan akuntan pada awalnya mungkin mencakup pekerjaan penata buku. Dalam setiap hal akuntan harus memiliki tingkat pengetahuan, pemahaman konsepsi dan keahlian analitis yang lebih tinggi dibandingkan dengan penata buku.

B. Sistem Akuntansi

1. Pengertian Sistem

Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2006:02). Menurut Steven A. Moscovice dalam Baridwan (2006:04) mendefinisikan sistem adalah suatu keseluruhan

(entity) yang terdiri dari bagian-bagian (disebut subsistem) yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen atau elemen yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.

2. Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa dan menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2006:02).

Menurut Howard F. Stettler dalam Baridwan (2006:5) yang mengutip definisi memberikan pengertian sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi.

Berdasarkan definisi sistem akuntansi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur pokok dalam suatu sistem akuntansi, yaitu: formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan.

3. Struktur Atau Elemen-Elemen Sistem Akuntansi

Struktur sistem akuntansi meliputi dua sistem, yaitu unsur sistem akuntansi pokok dan sistem akuntansi pendukung yang lain. Berikut ini diuraikan lebih lanjut pengertian masing-masing sistem akuntansi tersebut.

C. Akuntansi Pemerintahan

1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Sebagai salah satu bidang dalam ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintahan tak akan terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia.

Sedangkan pengertian pemerintahan, meskipun tampaknya konotasi lembaga politik lebih menonjol, aspek ekonominya tidak dapat dikesampingkan. Akuntansi pemerintahan menghususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan Negara.

Bahtiar Arif, dkk (2002:3) mengemukakan bahwa akuntansi Pemerintahan dapat didefinisikan menjadi suatu aktivitas pemberian jasa untuk

menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintahan serta informasi keuangan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah suatu bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyajikan informasi keuangan berdasarkan transaksi keuangan pemerintahan tersebut.

2. Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia (Peraturan Pemerintah RI nomor 24 tahun 2005).

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah Komite SAP. Komite SAP bertugas menyiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. KSAP bertujuan mengembangkan program-

program pengembangan akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintahan, termasuk mengembangkan SAP.

Komite SAP terdiri atas komite konsultatif dan komite kerja. Komite konsultatif bertugas memberi konsultasi dan atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP. Komite kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP, dan dalam melaksanakan tugasnya, dapat membentuk kelompok kerja. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Komite SAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. Komite SAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Dengan demikian, Komite SAP bertujuan mengembangkan program-program pengembangan akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintahan, termasuk mengembangkan SAP dan mempromosikan penerapan standart tersebut. Selain itu dalam penyusunannya, SAP juga telah diharmoniskan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.

3. Basis Akuntansi Pemerintahan

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan waktu kapan pengukuran ini dilakukan. Basis akuntansi ini pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual. Namun terdapat modifikasi

dari keduanya, yaitu basis kas dan basis akrual sama-sama digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

1. Basis Akuntansi Kas (Cash Basis of Accounting)

Menurut Abdul Halim (2004:39) basis kas adalah basis akuntansi yang paling sederhana. Menurut basis ini transaksi diakui atau dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakhir pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Apabila transaksi tersebut tidak berpengaruh pada kas maka transaksi tersebut tidak akan dicatat.

2. Basis Akuntansi Akrual (Accrual Basis of Accounting)

Menurut Abdul Halim (2002:41) basis akrual adalah akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan serta untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual (PP No. 24 tahun 2005)

Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan dalam PP 24/2005, basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas, diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas telah diterima atau dibayar.

Krisis ekonomi Indonesia tahun 1997, diikuti oleh era reformasi tahun 1998, pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999 sering disebut-sebut sebagai pemicu dari reformasi keuangan dan akuntansi pemerintahan. Mahmudi dalam Bastian (2006) menyebutkan bahwa perjalanan manajemen keuangan Negara/Daerah di Indonesia dapat dibagi dalam tiga fase yaitu: 1) era sebelum otonomi daerah, 2) eratransi otonomi (reformasi tahap 1) dan 3) era pascatransi (reformasi tahap 2).

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mewajibkan laporan keuangan tahun anggaran 2005 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang secara garis besar terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan ArusKas serta Catatan atas laporan Keuangan, yang dikenal sebagai basis kas menuju akrual.

5. Komponen Laporan Keuangan Menurut PP No. 24 Tahun 2005

PP No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang digunakan sampai saat ini. Basis akuntansi yang digunakan dalam SAP ini adalah basis kas menuju akrual (cash toward accrual), dimana penggunaan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Komponen-komponen laporan keuangan dalam SAP (PP No. 24 tahun 2005) adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca

mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos seperti Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Pajak dan Bukan Pajak, Persediaan, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang, dan Ekuitas Dana.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan –kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

- c. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar mukalaporan keuangan.

- d. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanjadan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- f. Daftar dan skedul.

6. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PP Nomor 71 Tahun 2010)

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Disamping itu, amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum

dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”. Akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah (KSAP,2006). Alasan penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
- b. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
- c. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.



D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan yaitu sebagai berikut:

1. Diduga laporan akuntansi keuangan di Kejaksaan Tinggi Riau sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. Diduga Kejaksaan Tinggi Riau sudah membuat jurnal penutup yang terkomputerisasi, namun belum membuat jurnal penyesuaian.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan membandingkan antara data yang telah dikumpulkan dengan teori-teori yang relevan dan kemudian diambil atau ditarik kesimpulan dan saran.

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Riau Bagian Keuangan. Yang beralamatkan Jl. Jendral Sudirman No. 375, Pekanbaru , dan Telepon 0761-29677.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data mengenai proses penyusunan keuangan, proses pengesahan keuangan, proses pelaksanaan keuangan, proses pengawasan keuangan serta proses pengesahan perhitungan keuangan di Kejaksaan Tinggi Riau.

2. Data Sekunder

Sejarah singkat pemerintah Kejaksaan Tinggi Riau, Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi serta laporan keuangan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau bertanya langsung kepada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian.

2. Teknik Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang diperoleh dari bagian keuangan.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan penulisan ini, maka penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang disajikan dalam bentuk skripsi.



BAB IV

GAMBARAN UMUM KEJAKSAAN TINGGI RIAU KOTA PEKANBARU

A. Profil Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru

Kejaksaan Tinggi Riau adalah jajaran Kejaksaan RI yang memiliki daerah tugas di wilayah Provinsi Riau. Instansi ini berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 375 Kota Pekanbaru.

Kejaksaan Tinggi ini terdiri atas satu Kejaksaan Negeri Tipe A (Kejaksaan Negeri Pekanbaru), sepuluh Kejaksaan Negeri Tipe B (Kejaksaan Negeri Rengat, Dumai, Bengkalis, Tembilahan, Bangkinang, Pasir Pangaraian, Siak Sri Indapura, Teluk Kuantan, Pangkalan Kerinci, Ujung Tanjung dan satu cabang Kejaksaan Negeri (Cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis di Selat Panjang). Kejaksaan Tinggi Riau dipimpin oleh Babul Khoir Harahap, SH, MH sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi.

Jumlah pegawai Kejaksaan se-Riau mencapai 446 orang, yang terdiri atas 208 orang Jaksa dan 238 orang Tata Usaha. Kemudian jumlah Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau berjumlah 12 Kejaksaan.

B. Tugas dan Fungsi Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru

TUGAS :

Melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
2. penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
3. pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
4. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum;
5. Pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaanm pemerintah danpenyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
6. penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal - hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;

7. pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
8. koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

C. Visi dan Misi Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru

VISI :

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai keputaan.

MISI :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.

2. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
3. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
5. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.



D. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Riau



Sumber: Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru, 2019.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru. Dari data yang diperoleh, maka dapat dianalisa tentang Sistem Akuntansi Keuangan yang di terapkan oleh Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut :

A. Analisis Sistem Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru

1. Sistem Penerimaan Kas

Sebelum penerimaan dana Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru, pada bagian Bendahara pengeluaran harus membuat surat permohonan kegiatan berdasarkan rencana kerja kepala jaksa selaku pengguna anggaran, kemudian kepala jaksa membuat disposisi untuk pemegang kas yang kemudian akan diserahkan kepada bendahara umum. Selanjutnya bendahara umum mengeluarkan SPT, SP2D, kwitansi, perincian dan kemudian di tandatangani oleh bendahara umum pengeluaran dan kepala jaksa. Setelah ditandatangani, bendahara umum menyerahkan cek kepada bagian yang membutuhkan dana. Cek tersebut di cairkan ke Bank, uang yang didapat dimasukkan ke kas. Atas transaksi tersebut oleh pembantu bendahara penerimaan disimpan sebagai bukti penerimaan kedalam buku kas umum dan tidak membuat jurnalnya.

Berikut ini gambar proses penerimaan kas pada Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru :

Gambar V.I

Proses Penerimaan Kas

Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru

Bendahara Pemasukan

Kepala Badan Bendahara Umum

Bank

Membuat surat permohonan

Paraf



Uang yang didapat dari Bank dimasukkan ke Kas

Membuat disposisi untuk pemegang Kas

Tanda tangan, SPT, SP2D, Kwitansi

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Menyiapkan dokumen SPT, SP2D, Kwitansi

Pemegang kas mengeluarkan cek ke bagian yang membutuhkan



Mencairkan dana di Bank

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019.

Dari proses penerimaan diatas dapat disimpulkan bahwa system penerimaan kas yang dianut oleh Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru yaitu untuk memudahkan pengontrolan uang yang diterima oleh Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru dan juga memudahkan pencatatan atas penerimaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru.

2. Sistem Pengeluaran Kas

Sedangkan untuk proses pengeluaran kas pada Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru dimulai dari pimpinan pelaksana mengajukan permohonan dana, lalu atasan bendahara pengeluaran memberikan persetujuan pembayaran yang dilakukan pimpinan pelaksana. Bendahara pengeluaran mengeluarkan kwitansi atas semua pengeluaran, lalu mengeluarkan uang dari kas, kemudian dibukukan dan dibuatkan dokumen yaitu SPD, SP2D, dan SPM sebagai bukti atas pengeluaran kas. Dokumen tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh atasan bendahara pengeluaran dan kepala jaksa.

Berikut ini gambar proses pengeluaran kas Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru :

Gambar V.2

Proses Pengeluaran Kas

Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru

Pimpinan Pelaksana Bendahara Pengeluaran Kepala Kejaksaan

Permohonan Dana



Pelaksanaan Kegiatan

Menyiapkan kwitansi SPD, SPM, SP2D

Mengeluarkan Dana dari Kas

Berkas disetujui dan di tandatangi Kepala Kejaksaan



Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019.

Secara keseluruhan proses pengeluaran kas yang dianut oleh Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru yaitu untuk memudahkan pengontrolan uang yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru dan juga memudahkan pencatatan atas pengeluaran kas yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru.

- B. Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru

Sistem akuntansi yang diterapkan Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Namun dalam praktik pelaksanaannya belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan contoh pelaksanaan akuntansi keuangan daerah pada Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru.

Pada Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru setiap transaksi yang terjadi hanya dicatat didalam buku besar umum saja. Hal ini dapat dilihat pada transaksi berikut :

31 Desember 2015 : Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 15.685.242.401

31 Desember 2015 : Belanja Modal sebesar Rp 4.131.708.975

Dari transaksi-transaksi diatas, Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru mencatat transaksi tersebut ke dalam Buku Besar seperti pada tabel berikut ini :

Tabel V.1

Buku Kas Umum

Desember 2015

Tanggal Uraian Kode Penerimaan

Rp Pengeluaran Rp

31-Des-2015Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 15.685.242.401

31-Des-2015Belanja Modal B.5 4.131.708.975

Sumber : Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru

Setelah membuat Buku Kas Umum Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru langsung membuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dari penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru diatas belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Adapun proses akuntansi keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang seharusnya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Transaksi diatas dibuat jurnal sebagai berikut :

Seharusnya Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru dalam pencatatan transaksinya melakukan pemisahan jurnal antara penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas.

Berikut ini tabel Jurnal Penerimaan Kas yang seharusnya dibuat oleh Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru.

Tabel V.2

Kejaksaaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru

Jurnal Penerimaan Kas

Desember 2015

Tanggal	Uraian	Ref	Jumlah Akumulasi	
31-Des-2015	Kas		15.685.242.401	15.685.242.401
Jumlah			15.685.242.401	15.685.242.401

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru melakukan pencatatan transaksi yang mengakibatkan pengeluaran kas dicatat dalam jurnal pengeluaran kas seperti tabel berikut :

Tabel V.3

Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru

Jurnal Pengeluaran Kas

Desember 2015

Tanggal	Uraian	Ref	Jumlah Akumulasi
31-Des-2015	Belanja Modal		4.131.708.975 4.131.708.975
Jumlah			4.131.708.975 4.131.708.975

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

2. Memposting ke Buku Besar

Setelah membuat jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas, proses selanjutnya adalah memposting ke Buku Besar, seperti berikut ini :

Tabel V.4

Buku Besar Kas

Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru

Desember 2015

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo
31-Des-2015	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak			15.685.242.401	
			15.685.242.401		
31-Des-2015	Belanja Modal		4.131.708.975		11.553.533.426

Jumlah 15.685.242.401 4.131.708.975 11.553.533.426

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Tabel V.5

Buku Besar Pendapatan

Kejaksanaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru

Desember 2015

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo
31-Des-2015	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak				
			15.685.242.401		15.685.242.401
Jumlah			15.685.242.401	15.685.242.401	

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Tabel V.6

Buku Besar Belanja Modal

Kejaksanaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru

Desember 2015

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo
31-Des-2015	Belanja Modal				
			4.131.708.975		4.131.708.975
Jumlah			4.131.708.975	4.131.708.975	

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

3. Membuat Neraca Saldo

Setelah dilakukan pempostingan ke Buku Besar, proses selanjutnya adalah membuat

Neraca Saldo seperti pada tabel berikut ini :

Tabel V.7

Neraca Saldo

Kejaksanaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru

Desember 2015

No. Akun	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Kas		11.553.533.426	
B.1	Pendapatan			15.685.242.401
B.5	Belanja Modal		4.131.708.975	
Jumlah			15.685.242.401	15.685.242.401

Sumber : Data Olahan Penulis 2019.

4. Jurnal Penyesuaian

Pada Kejaksanaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru pada akhir periode tidak membuat jurnal penyesuaian. Seharusnya Kejaksanaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru membuat jurnal penyesuaian agar nilai dari akun-akun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Berikut adalah salah satu transaksi yang seharusnya dilakukan penyesuaian :

Asset tetap merupakan kekayaan entitas yang dimasukkan untuk dipakai dalam jangka panjang dengan nilai ekonomis yang relative besar. Beberapa contoh asset tetap adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, tanah, jalan, irigasi, jaringan, dan asset tetap lainnya. Pada saat aktiva

diperoleh, ia dicatat sebesar harga pokoknya. Selama masa pemakaian, asset tetap akan mengalami penurunan nilai yang disebut penyusutan (depresiasi). Terdapat beberapa metode untuk menghitung biaya penyusutan yang dapat digunakan antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi, namun yang paling sering digunakan adalah metode garis lurus.

Adapun asset tetap Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru adalah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, asset tetap lainnya. Selain gedung dan Konstruksi dalam pengerjaan, seluruh asset dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik asset tersebut.

Asset tetap disajikan sebesar perolehan asset tersebut dan kemudian dikurangi akumulasi penyusutan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai penyusutan merupakan pengakuan adanya penurunan nilai aktiva tetap berwujud dan diakui sebagai pengurangan nilai tercatat asset tetap dan diinvestasikan dalam asset tetap.

Untuk menggambarkan pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru maka penulis melakukan perhitungan dan pencatatan sebagai berikut :

- Peralatan dan Mesin

Pada neraca asset tetap peralatan dan mesin tahun 2015 senilai Rp 4.150.000.000,-

Umur ekonomis peralatan dan mesin ditaksir 10 tahun dengan nilai tanpa sisa. Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus.

Jurnal pada saat pembelian peralatan dan mesin sebagai berikut :

Belanja Modal – Peralatan dan Mesin	Rp 4.150.000.000
Kas	Rp 4.150.000.000

Jurnal diatas akan mempengaruhi belanja modal dalam laporan realisasi anggaran, akan tetapi pencatatan tersebut belum masuk dalam akun asset tetap berupa peralatan dan mesin dan akun ekuitasnya. Untuk itu dibuat jurnal corollary sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin	Rp 4.150.000.000
Diinvestasikan dalam asset tetap	Rp 4.150.000.000

Untuk menghitung nilai peralatan dan mesin yang disusutkan adalah :

$$\text{Rp } 4.150.000.000 : 10 = \text{Rp } 415.000.000$$

Maka nilai penyusutan pada peralatan dan mesin sebesar Rp 415.000.000 pertahun.

Jurnal penyesuaian yang seharusnya dibuat oleh pembukuan sebagai berikut :

Diinvestasikan dalam asset tetap	Rp 415.000.000
Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	Rp
415.000.000	

5. Jurnal Penutup

Pada dasarnya siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi. Jurnal penutup merupakan bagian dari siklus akuntansi keuangan yang belum disajikan oleh Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru. Berikut jurnal penutup yang harus diterapkan oleh Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru :

a. Tahap I

Ikhtisar surplus/defisit Rp 78.887.803.738

Biaya Rp 78.887.803.738

b. Tahap II

Ikhtisar surplus/defisit Rp 31.871.525.000

Ekuitas dana Rp 31.871.525.000

c. Laporan Keuangan Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru

Pada dasarnya Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru telah membuat laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBN, entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Agar semakin jelas, penulis akan menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan yang dibuat oleh Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran dalam periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru sebagai salah satu instansi pemerintahan telah

membuat laporan realisasi anggaran sesuai dengan format dan unsur-unsur yang disebutkan dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2. Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai asset, kewajiban, dan modal pada tanggal tertentu. Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru selaku salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, telah membuat neraca sesuai dengan format dan unsur-unsur seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, namun dari segi asset, Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru belum mencantumkan nilai asset yang sesuai dengan nilai yang sesungguhnya, karena Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru belum melakukan perhitungan terhadap penyusutan asset tetapnya.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi yang menjelaskan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai yang tidak disajikan pada bagian manapun dalam laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca).

Catatan Atas Laporan Keuangan yang dibuat oleh Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada bagian pendahuluan menjelaskan dasar-dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- b. Menjelaskan kebijakan akuntansi yang menjadi dasar pelaporan SAP yaitu entitas akuntansi atau entitas pelaporan keuangan, basis akrual, dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
- c. Menjelaskan tentang ringkasan laporan yang terdiri dari anggaran dan estimasi pendapatan, realisasi pendapatan dan belanja, dan neraca.
- d. Berisikan tentang penjelasan atas pos-pos pada laporan realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan dan belanja.
- e. Berisikan tentang penjelasan atas pos-pos pada neraca yang terdiri dari kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, persediaan, asset tetap, investasi jangka panjang, kewajiban, dan ekuitas dana.

Secara keseluruhan isi dari catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, walaupun masih terdapat sedikit perbedaan dalam susunan dari setiap penjelasannya. Namun pada intinya catatan atas laporan keuangan yang dibuat Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru tersebut telah sesuai dengan fungsinya yaitu memberi

informasi atau penjelasan dari setiap laporan keuangan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman oleh setiap pembaca maupun penggunanya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang bermanfaat mengenai Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru.

A. Kesimpulan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru telah membuat laporan realisasi anggaran sesuai dengan format dan unsur-unsur yang disebutkan dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Namun setiap transaksi yang terjadi hanya dicatat dalam buku besar umum saja, tidak dibuat dalam bentuk jurnal terlebih dahulu.

2. Neraca

Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru telah membuat neraca sesuai dengan format dan unsur-unsur seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, namun dari segi asset, Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru belum mencantumkan nilai asset yang sesuai dengan nilai yang sesungguhnya, karena Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru belum melakukan perhitungan terhadap penyusutan asset tetapnya.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Secara keseluruhan isi dari catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, walaupun masih terdapat sedikit perbedaan dalam susunan dari setiap penjelasannya. Namun pada intinya catatan atas laporan keuangan yang dibuat Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru tersebut telah sesuai dengan fungsinya yaitu memberi informasi atau penjelasan dari setiap laporan keuangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan bagi:

1. Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru, peneliti menyarankan:
 - a. Dalam membuat laporan realisasi anggaran, seharusnya Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru membuat jurnal pemisah antara penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas terlebih dahulu, kemudian baru dicatat dalam buku besar umum.
 - b. Dalam membuat neraca, sebaiknya Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru melakukan perhitungan terhadap penyusutan asset tetapnya, kemudian mencantumkan nilai asset yang sesuai dengan nilai yang sesungguhnya.
 - c. Dalam membuat catatan atas laporan keuangan, seharusnya Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru memberi informasi atau penjelasan dari setiap laporan keuangan, agar tidak terjadi kesalahpahaman oleh setiap pembaca maupun penggunanya.

2. Peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan:
 - a. Peneliti selanjutnya untuk memperbanyak referensi dan konsep-konsep terbaru, sehingga isi penelitiannya lebih hangat dan segar.
 - b. Peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan ilmu yang didapatkan dari perkuliahan, dan mampu menciptakan ide-ide terbaru, sehingga hasil penelitiannya lebih kreatif dan berkualitas.
 - c. Peneliti selanjutnya harus lebih berani dalam menentukan lokasi penelitian, yakni berani memilih lokasi penelitian pada perusahaan-perusahaan raksasa dan instansi-instansi yang lebih besar dari Kejaksaan Tinggi Riau Kota Pekanbaru. Sehingga kita semua dapat sama-sama mengetahui kondisi internal dari instansi-instansi besar dan perusahaan-perusahaan raksasa tersebut, khususnya mengenai aktivitas akuntansi keuangannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2011)
- Anggoro, M. Toha. 2012. Metode Penelitian. Jakarta: Universitas Terbuka
- Arikunto, Suharsimi, 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian, Indra, 2011, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Belkaouni, Ahmed, 2014, Teori Akuntansi, Jilid 1, Edisi 2, Terjemahan Herman Wibowo, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ahmad Yani, S.H., M.M., Ak., Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan kedua, April, 2013.
- Anwar Sulaiman H., Drs., Manajemen Aset Daerah, STIA-LAN, 2012
- Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H., Determinasi Kebijakan Anggaran Negara Indonesia, Studi Yuridis, Papas Sinar Sinanti, Jakarta 2015.
- Halim, Abdul, 2014. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Harapan, Safian Safitri. 2012. Teori Akuntansi. Rajawali, Jakarta.
- I Gusti Ngurah Agung, Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, PT, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2016.
- Kusnadi, 2013, Akuntansi Keuangan Edisi Pertama. Univeristas Brawijaya, Malang.
- Kusnadi, 2015, Akuntansi Pemerintahan (Publik), Univeristas Brawijaya, Malang.
- Mardiasmo, 2012, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: Andi). h 98
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Bebas Kas Menuju Akrual.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010, *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*

[Http://Mappifhui.Org/2016/05/10](http://Mappifhui.Org/2016/05/10).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Laporan keuangan

Kejaksaan Tinggi Riau

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Jl Jendral Sudirman No.375

Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kejaksaan Tinggi Riau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan Tinggi Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Akuntansi Istimewa Papua. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pekanbaru, Januari 2016

Kepala,

Susdiyarto Agus Praptono, SH. MH

NIP. 19590815 198503 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	35
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
F. Pengungkapan Penting Lainnya	42
VI. Lampiran dan Daftar	

KEJAKSAAN TINGGI RIAU

JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 375 PEKANBARU
TELEPON 0761 29677, FAXIMILE 0761 32104

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kejaksaan Tinggi Riau yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekanbaru, Januari 2016
Kepala,

Susdiyarto Agus Praptono, SH. MH
NIP. 19590815 198503 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 15.685.242.401. atau mencapai 538.2 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 2.914.257.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp. 102.591.560.698 atau mencapai 92.14 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 102.591.560.698.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015 .

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar **Rp32.308.685.000** yang terdiri dari: **Aset Lancar sebesar Rp2.653.485.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp28.782.750.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp248.450.000; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp624.000.000.**

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp1.109.660.000 dan Rp31.871.525.000.**

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 19.503.853.594,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 98.074.486.090 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 78.543.632.496,-. Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 344171242 dan Rp. 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 78.887.803.738,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2014 adalah sebesar Rp. 29.469.352.891 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. 78.887.803.738 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 49.123.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp. 227.438.985.450

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR KEJAKSAAN TINGGI RIAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2015		% thd Angg	TA 2014
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.914.257.000	15.685.242.401	538,22	17.727.619.217
JUMLAH PENDAPATAN		2.914.257.000	15.685.242.401	538,22	17.727.619.217
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	64.325.665.000	64.525.906.427	100,31	44.792.455.862
Belanja Barang	B.4	42.426.292.000	33.933.945.296	79,98	12.350.000.000
Belanja Modal	B.5	4.587.250.000	4.131.708.975	90,07	6.230.000.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	#DIV/0!	140.000.000
JUMLAH BELANJA		111.339.207.000	102.591.560.698	92,14	63.512.455.862

II. NERACA

KANTOR KEJAKSAAN TINGGI RIAU NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2015	2014
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	20.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	6.000.000	2.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	80.000.000	18.000.000
Piutang Bukan Pajak	C.4	120.000.000	110.000.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	72.000.000	48.000.000
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	24.000.000	19.200.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	(11.055.000)	(6.555.000)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	454.540.000	400.000.000
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	135.000.000	153.850.000
Persediaan	C.10	1.753.000.000	1.200.000.000
Jumlah Aset Lancar		2.653.485.000	1.944.495.000
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	164.000.000	90.000.000
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	92.000.000	50.400.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	(7.550.000)	(7.020.000)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		248.450.000	133.380.000
ASET TETAP			
Tanah	C.14	12.100.000.000	6.000.000.000
Peralatan dan Mesin	C.15	4.150.000.000	2.100.000.000
Gedung dan Bangunan	C.16	16.500.000.000	14.000.000.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	680.000.000	100.000.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	210.000.000	180.000.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	750.000.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(5.607.250.000)	(4.501.000.000)
Jumlah Aset Tetap		28.782.750.000	17.879.000.000
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	400.000.000	40.000.000
Aset Lain-Lain	C.22	390.000.000	220.000.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(166.000.000)	(67.000.000)
Jumlah Aset Lainnya		624.000.000	193.000.000
JUMLAH ASET		32.308.685.000	20.149.875.000
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	20.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	134.080.000	18.000.000
Pendapatan Ditangguhkan	C.26		22.000.000
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	164.200.000	165.400.000
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.28	118.880.000	166.450.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		437.160.000	371.850.000
JUMLAH KEWAJIBAN		437.160.000	371.850.000
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar	C.29		1.572.645.000
Ekuitas Dana Investasi	C.30		18.205.380.000
Ekuitas	C.31	31.871.525.000	
JUMLAH EKUITAS DANA		31.871.525.000	19.778.025.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		32.308.685.000	20.149.875.000

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI RIAU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2015	2014	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	19,530,853,594	0	19,530,853,594	0.00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	19,530,853,594	0	19,530,853,594	0.00
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	19,530,853,594	0	19,530,853,594	0.00
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	63,273,381,670	0	63,273,381,670	0.00
Beban Persediaan	218,370,200	0	218,370,200	0.00
Beban Barang dan Jasa	29,249,870,366	0	29,249,870,366	0.00
Beban Pemeliharaan	3,716,952,938	0	3,716,952,938	0.00
Beban Perjalanan Dinas	944,343,713	0	944,343,713	0.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	651,179,552	0	651,179,552	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	20,387,651	0	20,387,651	0.00
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	98,074,486,090	0	98,074,486,090	0.00
SURPLUS//DEFISIT DARI KEGIATAN	(78.543.632.496)	0	(78.543.632.496)	0.00

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2015	2014	Jumlah	%
1	2	3	4	5
OPERASIONAL				
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	438,513,584	0	438,513,584	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(438,513,584)	0	(438,513,584)	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	94,342,342	0	94,342,342	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	94,342,342	0	94,342,342	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(344,171,242)		(344,171,242)	
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0		0	
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(78,887,803,738)	0	(78,887,803,738)	0.00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI RIAU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2015	2014	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	219,469,352,891	0	219,469,352,891	0.00
SURPLUS/DEFISIT - LO	(78,887,803,738)	0	(78,887,803,738)	0.00
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	241,000	0	241,000	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	241,000	0	241,000	0.00
Penyesuaian Nilai Kewajiban	0	0	0	0.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	(49,123,000)	0	(49,123,000)	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	(49,123,000)	0	(49,123,000)	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Lain-lain	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	86,906,318,297	0	86,906,318,297	0.00
Pengesahan Hibah Langsung	0	0	0	0.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	7,969,632,559	0	7,969,632,559	0.00
EKUITAS AKHIR	227,438,985,450	0	227,438,985,450	0.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Kejaksaan Tinggi Riau didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman NO.375 Pekanbaru.

Kantor Kejaksaan Tinggi Riau mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kejaksaan Tinggi Riau berkomitmen dengan visi "***mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.***" Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau Tahun 2015 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau adalah 5 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	006	Kantor Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau	-	1	-	-	1
2	006	Kejaksaan Negeri Pekanbaru	-	1	-	-	1
3	006	Kejaksaan Negeri Bengkalis	-	1	-	-	1
4	006	Kejaksaan Negeri Rengat	-	1	-	-	1
5	006	Kejaksaan Negeri Tembilahan	-	1	-	-	1
6	006	Kejaksaan Negeri Bangkinang	-	1	-	-	1
7	006	Kejaksaan Negeri Dumai					
8	006	Kejaksaan Negeri selat panjang	-	1	-	-	1
9	006	Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian	-	1	-	-	1
10	006	Kejaksaan Negeri siak Sri Indrapura	-	1	-	-	1

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

*Basis
Akuntansi*

11	006	Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan	-	1	-	-	1
12	006	Kejaksaan Negeri Bagan Siapi-Api	-	1	-	-	1
13	006	Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci	-	1	-	-	1
Jumlah			-	13	-	-	13

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan

azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang

Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun
--	---------

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan

tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2015	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	103.000	103.000
Pendapatan Lain-lain	2.914.154.000	2.914.154.000
Jumlah Pendapatan	2.914.257.000	2.914.257.000
Belanja		
Belanja Pegawai	6.500.000.000	7.000.000.000
Belanja Barang	15.000.000.000	12.800.000.000
Belanja Bantuan Sosial	200.000.000	200.000.000
Belanja Modal	9.000.000.000	11.100.000.000
Jumlah Belanja	30.700.000.000	31.100.000.000

Realisasi

Pendapatan

Rp720.000.000

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar **Rp720.000.000** atau mencapai **96 persen** dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp750.000.000**. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau berasal dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Pendapatan Jasa berasal dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Penegakan Hukum dan memberikan pelayanan serta Kepastian Hukum kepada masyarakat.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2015

Uraian	2015		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	700.000.000	620.000.000	88,57
Pendapatan Lain-lain	50.000.000	100.000.000	200,00
Jumlah	750.000.000	720.000.000	96,00

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2015 mengalami kenaikan

sebesar 10.77% dibandingkan realisasi TA 2014. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pelayanan jasa akuntansi sehubungan dengan kewajiban penerapan akuntansi berbasis akrual di tahun 2015.

Selain itu terdapat kenaikan Pendapatan Lain-lain dari Rp30.000.000 menjadi Rp40.000.000 atau sebesar 33.33% dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu. Hal ini berasal dari pendapatan jasa lembaga keuangan dan pengembalian belanja pegawai serta belanja lainnya.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	620.000.000	587.000.000	5,62
Pendapatan Lain-lain	100.000.000	63.000.000	58,73
Jumlah	720.000.000	650.000.000	10,77

Realisasi

Belanja Negara

Rp.

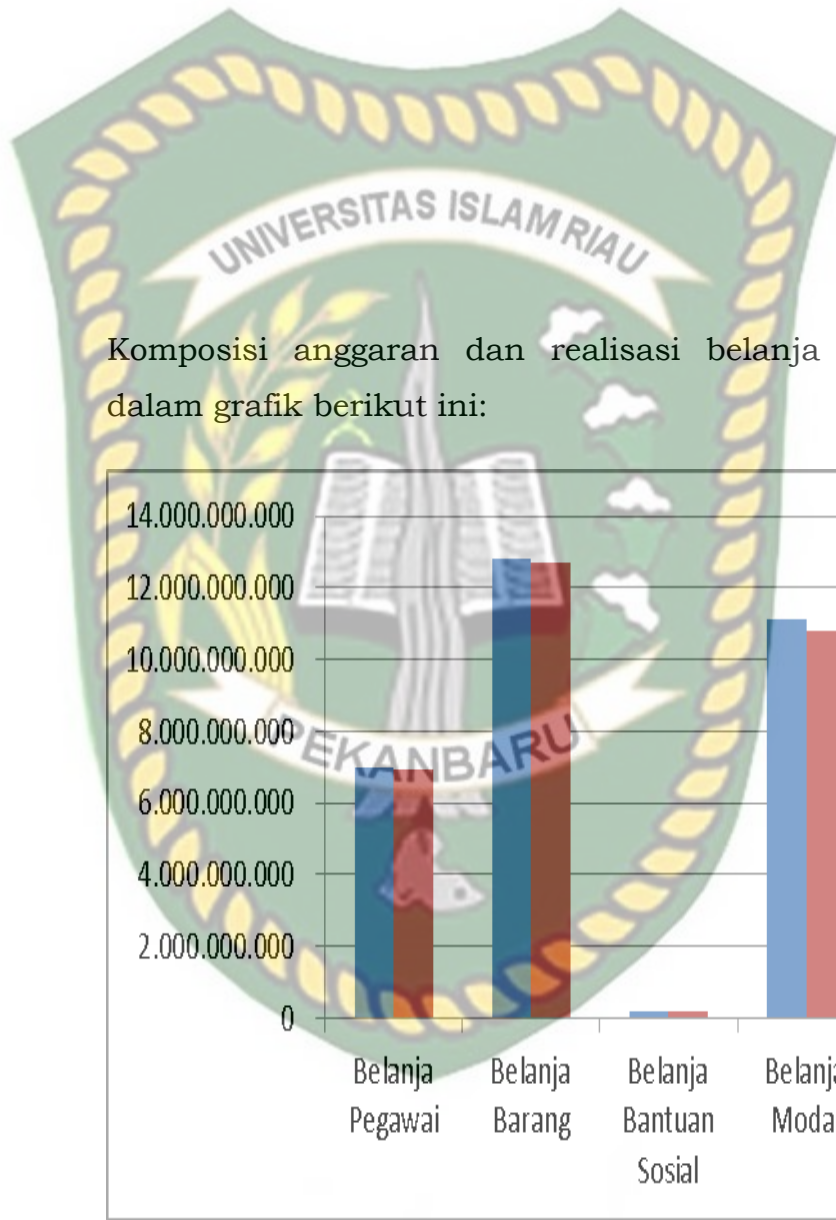
102.591.560.698

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2015 adalah sebesar Rp. 102.591.560.698 atau 92,14 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 111.339.207.000. Rincian anggaran danrealisasi belanja TA 2015 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2015

URAIAN	CATATAN	TA 2015		% thd Angg	TA 2014
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	64.325.665.000	64.525.906.427	100,31	44.792.455.862
Belanja Barang	B.4	42.426.292.000	33.933.945.296	79,98	12.350.000.000
Belanja Modal	B.5	4.587.250.000	4.131.708.975	90,07	6.230.000.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	#DIV/0!	140.000.000
JUMLAH BELANJA		111.339.207.000	102.591.560.698	92,14	63.512.455.862



Realisasi Belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 21.78% dibandingkan realisasi belanja pada TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pengadaan belanja modal diikuti dengan peningkatan belanja barang untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada TA 2015,
2. Kegiatan pemberdayaan sosial yang dibiayai dari belanja bantuan social untuk penduduk daerah terpencil dan perbatasan negara yang mempunyai kerawanan sosial.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6.900.000.000	6.400.000.000	7,81
Belanja Barang	12.700.000.000	12.350.000.000	2,83
Belanja Bantuan Sosial	200.000.000	140.000.000	42,86
Belanja Modal	10.790.000.000	6.230.000.000	73,19
Jumlah	30.590.000.000	25.120.000.000	21,78

Belanja Pegawai B.3 Belanja Pegawai

Rp6.900.000.000

Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp6.900.000.000 dan Rp6.400.000.000.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 7.81 persen dari realisasi belanja TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2. Penambahan remunerasi PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.931.000.000	4.800.000.000	2,73
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	997.000.000	700.000.000	42,43
Belanja Honorarium	558.300.000	550.000.000	1,51
Belanja Lembur	299.000.000	250.000.000	19,60
Belanja Vakasi	164.700.000	130.000.000	26,69
Jumlah Belanja Kotor	6.950.000.000	6.430.000.000	8,09
Pengembalian Belanja Pegawai	(50.000.000)	(30.000.000)	66,67
Jumlah Belanja	6.900.000.000	6.400.000.000	7,81

Belanja Barang
Rp12.700.000.000

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp12.700.000.000 dan Rp12.350.000.000. Realisasi Belanja Barang TA 2015 mengalami kenaikan 2.83% dari Realisasi Belanja Barang TA 2014.

Hal ini antara lain disebabkan oleh biaya perjalanan dinas peserta diklat serta pengadaan perlengkapan untuk kegiatan peserta sepanjang tahun 2015.

Perbandingan Belanja Barang TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI TA 2015	REALISASI TA 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	3.937.000.000	4.570.000.000	(13,85)
Belanja Barang Non Operasional	1.000.000.000	970.000.000	3,09
Belanja Jasa	1.824.000.000	1.480.000.000	23,24
Belanja Pemeliharaan	1.755.000.000	1.356.000.000	29,42
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.834.000.000	2.304.000.000	23,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	1.350.000.000	1.670.000.000	(19,16)
Jumlah Belanja Kotor	12.700.000.000	12.350.000.000	2,83
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	12.700.000.000	12.350.000.000	2,83

Belanja Modal
Rp10.790.000.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp10.790.000.000 dan Rp6.230.000.000.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 73,19% dibandingkan TA 2014 disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual, dan berakibat peningkatan kebutuhan fasilitas pelatihan akuntansi, berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, irigasi serta belanja modal lainnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	5.900.000.000	3.000.000.000	96,67
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.200.000.000	1.500.000.000	46,67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.750.000.000	1.050.000.000	66,67
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	580.000.000	400.000.000	45,00
Belanja Modal Lainnya	360.000.000	280.000.000	28,57
Jumlah Belanja Kotor	10.790.000.000	6.230.000.000	73,19
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	10.790.000.000	6.230.000.000	73,19

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp5.900.000.000** dan **Rp3.000.000.000**.

Realisasi Belanja Modal TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 96.67 persen dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan penambahan tanah yang akan digunakan sebagai sarana pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang

akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A 2014	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	4.600.000.000	2.200.000.000	109,09
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	460.000.000	220.000.000	109,09
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	180.000.000	120.000.000	
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	480.000.000	300.000.000	60,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	180.000.000	160.000.000	12,50
Jumlah Belanja Kotor	5.900.000.000	3.000.000.000	96,67
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	5.900.000.000	3.000.000.000	96,67

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 adalah sebesar Rp2.200.000.000, mengalami kenaikan sebesar 46.67 persen bila dibandingkan dengan TA 2014 yaitu sebesar Rp1.500.000.000.

Hal ini disebabkan oleh penambahan gedung baru yang diikuti dengan penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung. Adapun penambahan tersebut dalam rangka persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual mulai tahun 2015.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	700.000.000	530.000.000	32,08
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	800.000.000	500.000.000	60,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	100.000.000	70.000.000	42,86
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	600.000.000	400.000.000	50,00
Jumlah Belanja Kotor	2.200.000.000	1.500.000.000	46,67
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	2.200.000.000	1.500.000.000	46,67

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar **Rp1.750.000.000** dan **Rp1.050.000.000**. Realisasi belanja gedung dan bangunan TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 40 persen yang berasal dari penambahan ruang kelas baru dan gedung baru yang dikhususkan untuk pelatihan. Gedung ini berlokasi di Kantor Seluru Satker dibawah Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A. 2014	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.500.000.000	950.000.000	36,67
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan	250.000.000	100.000.000	60,00
Jumlah Belanja Kotor	1.750.000.000	1.050.000.000	40,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	
Jumlah Belanja	1.750.000.000	1.050.000.000	40,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Realisasi TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan realisasi tahun anggaran lalu.

Hal ini disebabkan penambahan jaringan teknologi informasi di semua satuan kerja lingkup Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Papua dalam rangka mendukung

rencana strategis.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BELANJA	T.A 2015	T.A 2014	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	520.000.000	360.000.000	44,44
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	60.000.000	40.000.000	50,00
Jumlah Belanja Kotor	580.000.000	400.000.000	45,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	580.000.000	400.000.000	45,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp360.000.000 dan Rp280.000.000. Realisasi TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 22 persen dibandingkan TA 2014. Hal ini disebabkan pengadaan *software* pendapatan untuk implementasi akuntansi berbasis akrual di seluruh satuan kerja lingkup Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Papua.

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp. 0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 0 % dibandingkan TA 2014. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2015

dan 2014

URAIAN	REALISASI T.A. 2015	REALISASI T.A 2014	NAIK (TURUN) %
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran Rp.
20.000.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp20.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
Uang tunai	6.000.000	-
Rekening Bank	14.000.000	-
Jumlah	20.000.000	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp6.000.000*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar masing-masing Rp6.000.000 dan Rp2.000.000. Kas di Bendahara

Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	TH 2015	TH 2014
Uang Tunai	1.500.000	864.000
Rekening Bank	4.500.000	1.136.000
Jumlah	6.000.000	2.000.000

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp80.000.000

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp80.000.000. dan Rp18.000.000.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	14.000.000	4.000.000
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	25.000.000	5.500.000
Kas Lainnya dari Hibah	41.000.000	8.500.000
Jumlah	80.000.000	18.000.000

Piutang PNBPNP Rp120.000.000

C.4 Piutang PNBPNP

Saldo Piutang PNBPNP per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp120.000.000. dan Rp110.000.000. Piutang PNBPNP merupakan hak atau

pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP

Uraian	TH 2015	TH 2014
Piutang PNBP	105.000.000	100.000.000
Piutang Lainnya	15.000.000	10.000.000
Jumlah	120.000.000	110.000.000

*Bagian Lancar
TP/TGR
Rp72.000.000*

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp72.000.000 dan Rp48.000.000. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Debitur per Satker	Tahun 2015	Tahun 2014
1	Satker Kanwil Papua	11.000.000	-
2	Kantor Akuntansi Istimewa Papua	36.000.000	24.000.000
3	Kantor Akuntansi Istimewa Biak	8.000.000	13.500.000
4	Kantor Akuntansi Istimewa Merauke	12.500.000	8.000.000
5	Kantor Akuntansi Istimewa Sorong	4.500.000	-
6	Kantor Akuntansi Istimewa Manokwari	0	2.500.000
Jumlah		72.000.000	48.000.000

*Bagian Lancar
TPA
Rp24.000.000*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp24.000.000 dan Rp19.200.000. Bagian

Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Debitur per Satker	TH 2015	TH 2014
1	Kantor Akuntansi Istimewa Papua	12.000.000	9.600.000
2	Kantor Akuntansi Istimewa Biak	5.700.000	-
3	Kantor Akuntansi Istimewa Merauke	3.800.000	3.800.000
4	Kantor Akuntansi Istimewa Sorong	2.500.000	4.500.000
5	Kantor Akuntansi Istimewa Manokwari	-	1.300.000
Jumlah		24.000.000	19.200.000

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp11.055.000*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp11.055.000 dan Rp6.555.000. Penyisihan piutang taktertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	50.000.000	0,50%	250.000
Kurang Lancar	70.000.000	10%	7.000.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	120.000.000		7.250.000
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	45.000.000	0,50%	225.000
Kurang Lancar	27.000.000	10%	2.700.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	72.000.000		2.925.000
Bagian Lancar TPA			
Lancar	16.000.000	0,50%	80.000
Kurang Lancar	8.000.000	10%	800.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	24.000.000		880.000
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	216.000.000		11.055.000

Belanja Dibayar di Muka Rp454.540.000

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp454.540.000 dan Rp400.000.000. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka

Jenis	TH 2015	TH 2014
Pembayaran Internet	80.000.000	160.000.000
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	185.000.000	140.000.000
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	189.540.000	100.000.000
Jumlah	454.540.000	400.000.000

Pendapatan yang Masih

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31

Harus Diterima
Rp135.000.000

Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp135.000.000 dan Rp153.850.000, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya.

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2015 dan 2014

Jenis	TH 2015	TH 2014
Pendapatan Jasa Pelatihan	114.740.000	82.810.000
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	20.260.000	71.040.000
Jumlah	135.000.000	153.850.000

Persediaan
Rp.1.753.000.000

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp1.753.000.000 dan Rp1.200.000.000.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2015	TH 2014
Barang Konsumsi	385.800.000	550.000.000
Barang untuk Pemeliharaan	486.900.000	300.000.000
Suku Cadang	424.000.000	180.000.000
Persediaan Lainnya	456.300.000	170.000.000
Jumlah	1.753.000.000	1.200.000.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp1.100.000 berada dalam kondisi rusak dan tidak

disajikan dalam Persediaan.

Tagihan

TP/TGR

Rp164.000.000

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp164.000.000. dan Rp90.000.000. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian TagihanTuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Debitur per Satker	Tahun 2015	Tahun 2014
1	Satker Kanwil Papua	22.500.000	-
2	Kantor Akuntansi Istimewa Papua	54.000.000	45.000.000
3	Kantor Akuntansi Istimewa Biak	36.870.000	12.000.000
4	Kantor Akuntansi Istimewa Merauke	48.660.000	6.470.000
5	Kantor Akuntansi Istimewa Sorong	1.970.000	-
6	Kantor Akuntansi Istimewa Manokwari	0	26.530.000
Jumlah		164.000.000	90.000.000

Tagihan

Penjualan

Angsuran

Rp92.000.000

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp92.000.000 dan Rp50.400.000.

Rincian TPA untuk tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA

No	Debitur	TH 2015	TH 2014
1	Kantor Akuntansi Istimewa Papua	18.000.000	25.200.000
2	Kantor Akuntansi Istimewa Biak	21.200.000	-
3	Kantor Akuntansi Istimewa Merauke	34.450.000	9.600.000
4	Kantor Akuntansi Istimewa Sorong	12.350.000	10.800.000
5	Kantor Akuntansi Istimewa Manokwari	6.000.000	4.800.000
Jumlah		92.000.000	50.400.000

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp7.550.000*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp7.550.000 dan Rp7.020.000.

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	120.000.000	0,50%	600.000
Kurang Lancar	44.000.000	10%	4.400.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	164.000.000		5.000.000
Tagihan PA			
Lancar	70.000.000	0,50%	350.000
Kurang Lancar	22.000.000	10%	2.200.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	92.000.000		2.550.000
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	256.000.000		7.550.000

Tanah

Rp12.100.000.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kanwil Kejaksaan Tinggi Riau per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp12.100.000.000 dan Rp6.000.000.000.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	Rp	6.000.000.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	5.900.000.000
Hibah	Rp	200.000.000
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	12.100.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2015	Rp	12.100.000.000

Tanah seluas 2000 m² yang terletak di Jl.Matoa No. 17, Jayapura pada Kantor Akuntansi Istimewa Papua, pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga.

Peralatan dan

Mesin

Rp4.150.000.000

C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar

Rp4.150.000.000 dan Rp2.100.000.000. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014	Rp	2.100.000.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	1.750.000.000
Hibah	Rp	122.115.000
Transfer Masuk	Rp	100.000.000
Reklasifikasi Masuk	Rp	50.000.000
Koreksi tambah	Rp	277.885.000
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	(100.000.000)
Penghapusan	Rp	(150.000.000)
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	4.150.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	Rp	(1.317.900.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	Rp	2.832.100.000

Mutasi tambah:

- Pembelian komputer unit senilai Rp200.000.000.
- Pengadaan alat angkutan darat bermotor senilai Rp1.550.000.000.
- Hibah sebesar Rp122.115.000 merupakan hibah alat kantor dan rumah tangga yang pencatatannya berdasarkan nilai pada berita acara serah terima (BAST).
- Transfer masuk berupa komputer unit dan peralatan komputer dari Kantor Pusat BAPK sebesar Rp100.000.000.
- Reklasifikasi masuk berasal dari pengaktifan kembali alat angkutan darat bermotor yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp50.000.000.
- Koreksi tambah berasal dari koreksi atas saldo awal dengan total Rp277.885.000.

Mutasi kurang:

- Penghentian alat studio, komunikasi, dan pemancar dari penggunaannya sebesar Rp100.000.000 dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain.

*Gedung dan
Bangunan
Rp16.500.000.000*

- b. Penghapusan sebesar Rp150.000.000 berupa alat angkutan darat bermotor.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp16.500.000.000 dan Rp14.000.000.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	14.000.000.000
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	2.200.000.000
Koreksi pencatatan	300.000.000
Saldo per 31 Desember 2015	16.500.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	(4.021.100.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	12.478.900.000

Mutasi tambah:

- Pembangunan gedung baru serta penambahan ruang kelas senilai Rp2.200.000.000.
- Koreksi nilai sebesar Rp300.000.000 yang merupakan koreksi pencatatan dari tahun anggaran yang lalu.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp680.000.000*

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp680.000.000 dan Rp100.000.000. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	100.000.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	580.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2015	680.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	(182.250.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	497.750.000

Transaksi penambahan berupa penambahan jaringan teknologi informasi di seluruh wilayah Papua dalam rangka mempercepat pelaporan keuangan secara elektronik.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp210.000.000*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp210.000.000 dan Rp180.000.000. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	180.000.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	30.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2015	210.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015	(86.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	124.000.000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp750.000.000

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp750.000.000. dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan pada Kantor Akuntansi Istimewa Papua dan Biak yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1	02/KPA.KAI/2015	1.000.000.000	32.5	325.000.000	KAI PAPUA
2	10/KPA.KAI/2015	850.000.000	50	425.000.000	KAI BIAK
	Jumlah	1.850.000.000		750.000.000	

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp5.607.250.000

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp5.607.250.000

dan Rp4.501.000.000. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 4.150.000.000	Rp 1.317.900.000	Rp 2.832.100.000
2	Gedung dan Bangunan	Rp 16.500.000.000	Rp 4.021.100.000	Rp 12.478.900.000
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 680.000.000	Rp 182.250.000	Rp 497.750.000
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 210.000.000	Rp 86.000.000	Rp 124.000.000
	Akumulasi Penyusutan	Rp 21.540.000.000	Rp 5.607.250.000	Rp 15.932.750.000

*Aset Tak
Berwujud
Rp400.000.000*

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp400.000.000 dan Rp40.000.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Software Komputer	240.000.000
ATB Lainnya	160.000.000
	400.000.000

Mutasi:

Aset Lain-Lain
Rp390.000.000

Saldo per 31 Desember 2014	Rp	40.000.000
Mutasi tambah:		
pembelian	Rp	360.000.000
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	400.000.000
Amortisasi	Rp	(81.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	Rp	319.000.000

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp390.000.000 dan Rp220.000.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Kejaksaan Tinggi Riau serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2014	Rp	220.000.000
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	250.000.000
Mutasi kurang:		
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	(50.000.000)
- penghapusan BMN	Rp	(30.000.000)
Saldo per 31 Desember 2015	Rp	390.000.000
Akumulasi Penyusutan	Rp	(85.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2015	Rp	305.000.000

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Reklasifikasi dari aset tetap berupa penghentian penggunaan alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp250.000.000 dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain.
- Pengurangan melalui reklasifikasi dari Aset Lainnya merupakan pengaktifan kembali alat angkutan yang

telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp50.000.000.

- c. Pengurangan berupa penghapusan sebesar Rp30.000.000. merupakan penghapusan kendaraan bermotor melalui penjualan.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp166.000.000*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp166.000.000 dan Rp67.000.000. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	400.000.000	81.000.000	319.000.000
Aset Lain-lain	390.000.000	85.000.000	305.000.000
Jumlah	790.000.000	166.000.000	624.000.000

*Uang Muka dari
KPPN
Rp20.000.000.*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp20.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Kantor Akuntansi Istimewa adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN

No	Uraian	Tahun 2015
1	Kantor Akuntansi Istimewa Papua	10.000.000
2	Kantor Akuntansi Istimewa Biak	3.000.000
3	Kantor Akuntansi Istimewa Sorong	7.000.000
Jumlah		20.000.000

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp134.080.000*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp134.080.000 dan Rp18.000.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Kanwil Kejaksaan Tinggi Riau per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	Rp 72.280.000
2	Potongan Pajak yang belum disetor	Rp 15.000.000
4	Utang kepada Pihak Lainnya	Rp 46.800.000
Total		Rp 134.080.000

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp164.200.000*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp164.200.000 dan Rp165.400.000. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum

diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta	65.500.000	Jasa Pelatihan Akuntansi
Instansi Pemerintah Lainnya	24.900.000	Penyusunan Neraca Awal
Badan Lainnya	73.800.000	Jasa Pelatihan Akuntansi
Total	164.200.000	

Beban yang Masih harus Dibayar Rp118.880.000

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp118.880.000 dan Rp188.450.000, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2015 dan TA 2014

Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2014
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	21.745.000	70.010.000
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	55.755.000	54.090.000
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	41.380.000	64.350.000
Jumlah	118.880.000	188.450.000

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar per masing-masing satker disajikan pada lampiran.

Ekuitas Rp31.871.525.000

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp31.871.525.000 dan Rp19.778.025.000. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan

Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp912.530.000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp912.530.000 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2015 dan 2014

URAIAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	596.000.000	-	-
Pendapatan Lain-lain	316.530.000	-	-
Jumlah	912.530.000	-	-

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-lain-LO merupakan pengembalian beban pegawai, beban jasa, dan perjalanan dinas yang berasal dari transaksi tahun 2014.

Beban Pegawai

Rp6.940.000.000

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp6.940.000.000 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai

yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	3.618.700.000	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	2.271.300.000	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	750.000.000	-	-
Beban Lembur	300.000.000	-	-
Jumlah	6.940.000.000	-	-

Beban

Persediaan

Rp3.487.000.000

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp3.487.000.000 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.575.000.000	-	-
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	912.500.000	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	799.500.000	-	-
Beban Persediaan Lainnya	200.000.000	-	-
Jumlah Beban Persediaan	3.487.000.000	-	-

Beban Barang dan Jasa
Rp1.924.000.000

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.924.000.000 dan Rp0. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	407.980.000	-	-
Beban Barang Non Operasional	115.420.000	-	-
Beban Langganan Daya dan Jasa	335.700.000	-	-
Beban Jasa Pos dan Giro	161.600.000	-	-
Beban Jasa Konsultan	250.000.000	-	-
Beban Jasa Profesi	499.200.000	-	-
Beban Jasa Lainnya	54.100.000	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	60.000.000	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	30.000.000	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	10.000.000	-	-
Jumlah	1.924.000.000	-	-

Beban Pemeliharaan
Rp1.755.000.000

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.755.000.000 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2015 dan TA 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2015 dan 2014

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp2.834.000.000*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	969.300.000	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	558.900.000	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	226.800.000	-	-
Jumlah	1.755.000.000	-	-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.834.000.000 dan Rp0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.147.000.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	779.600.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	653.400.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	254.000.000	-	-
Jumlah	2.834.000.000	-	-

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp1.350.000.000*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.350.000.000 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Papua untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan

pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	200.000.000	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	700.000.000	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	450.000.000	-	-
Jumlah	1.350.000.000	-	-

*Beban Bantuan Sosial
Rp200.000.000*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp200.000.000 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2015 dan 2014

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	30.000.000	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	60.000.000	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	110.000.000	-	-
Jumlah	200.000.000	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2015

Rp1.175.000.000 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.175.000.000 dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2015 dan 2014

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	630.100.000	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	335.900.000	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	68.000.000	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	42.000.000	-	-
Jumlah Penyusutan	1.076.000.000	-	-
Beban Amortisasi Aplikasi	54.000.000	-	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	45.000.000	-	-
Jumlah Amortisasi	99.000.000	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.175.000.000	-	-

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp5.030.000*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp5.030.000 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2015 dan 2014

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp16.000.000

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	4.500.000	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	530.000	-	-
Jumlah	5.030.000	-	-

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2015 dan 2014

URAIAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat Angkut	24.000.000	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat Kantor	(3.000.000)	-	-
Defisit Selisih Kurs	(5.000.000)	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	16.000.000	-	-

Defisit Pos Luar Biasa D.12 Defisit Pos Luar Biasa*Biasa**Rp155.000.000*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2015 dan 2014

URAIAN	TH 2015	TH 2014	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	15.000.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas	(60.000.000)	-	-
Beban Persediaan	(110.000.000)	-	-
Jumlah	(155.000.000)	-	-

Terdapat dua Kantor Akuntansi Istimewa yaitu Papua dan Merauke yang menyumbang nilai pada Pos Luar Biasa karena terjadi bencana longsor bukit dan banjir. Pendapatan PNB di atas merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin yang rusak pasca bencana, sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*Ekuitas Awal**Rp19.778.025.000***E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp19.778.025.000 dan Rp0.

*Defisit LO**Rp18.896.500.000***E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah defisit sebesar Rp18.896.500.000 dan Rp0. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar

biasa.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp100.000.000

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.100.000.000 dan Rp0. Rincian untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	50.000.000
2. Suku Cadang	15.000.000
3. Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	30.000.000
4. Barang Persediaan Lainnya	5.000.000
Jumlah	100.000.000

Koreksi Nilai

Aset Tetap

Rp577.885.000

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi Nilai Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi kesalahan penilaian aset tetap untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp577.885.000 dan Rp0. Rincian untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap

Jenis Koreksi	Nilai
Koreksi tambah	
Peralatan dan Mesin	277.885.000
Gedung dan Bangunan	300.000.000
Total	577.885.000

Koreksi Atas

E.5 Koreksi Atas Beban

Beban**Rp150.000.000**

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp150.000.000 dan Rp0. Rincian untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	95.000.000
Beban Jasa	45.000.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000
Jumlah	150.000.000

Koreksi Atas**Pendapatan****Rp30.000.000****E.6 Koreksi Atas Pendapatan**

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi kurang atas Pendapatan untuk TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp30.000.000 dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk TA 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Aset Tetap	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	20.000.000
Pendapatan Lain-Lain	10.000.000
Jumlah	30.000.000

Hibah**Masuk/Keluar****E.7 Hibah Masuk/Keluar**

Koreksi Atas Hibah Masuk/Keluar merupakan pencatatan

Rp322.115.000 atas hibah masuk/keluar berupa hibah barang. Koreksi pencatatan hibah masuk/keluar untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp322.115.000 dan Rp0. Rincian Koreksi Hibah Masuk/Keluar untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Nilai Koreksi Hibah Masuk/Keluar

Jenis Koreksi	Nilai
Hibah	
Tanah	200.000.000
Peralatan dan Mesin	122.115.000
Total	322.115.000

Ekuitas Akhir

E.8 Ekuitas Akhir

Rp31.871.525.000

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp31.871.525.000 dan Rp19.778.025.000.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 15 Januari 2016 telah terjadi bencana alam berupa banjir yang menyebabkan sebagian gedung kantor terendam banjir. Kejadian tersebut mengakibatkan masalah serius dalam pemberian pelayanan kepada *stakeholder*. Jaringan komputer, Instalasi listrik, dan berbagai peralatan kantor mengalami kerusakan. Untuk menanggulangi hal tersebut Kepala Kantor Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau telah membentuk tim untuk untuk mengidentifikasi kerusakan yang diakibatkan oleh banjir tersebut dan menginstruksikan untuk tetap memberikan pelayanan kepada *stakeholder*.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 234/BALAP.5/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 023/BALAP.5/2015 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah Kejaksaan Tinggi Riau pada tanggal 05 Juli 2015 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan.

Penggantian pejabat dimaksud adalah sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Semula	Menjadi
Kantor Akuntansi Istimewa Papua	Kuasa Pengguna Anggaran	Denny SF	Mutiara
	Pejabat Pembuat Komitmen	Fitra	Meini
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Komang	Fajar
	Bendahara	Yessy	Martha
Kantor Akuntansi Istimewa Biak	Kuasa Pengguna Anggaran	Sutawijaya	Utami
	Pejabat Pembuat Komitmen	Diana	Tema
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Fajar Utama	Okto
	Bendahara	Yanuraga	Jumina

Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi
dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
				Per 31-12-2014	Tahun 2015	Per 31-12-2015	Per 31-12-2015
A	Tanah						
1	Tanah	-	12.100.000.000	-	-	-	12.100.000.000
	Jumlah		12.100.000.000	-	-	-	12.100.000.000
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	460.000.000	221.450.000	92.900.000	314.350.000	145.650.000
2	Alat Kantor	5	1.200.000.000	110.000.000	211.100.000	321.100.000	878.900.000
3	Alat Rumah Tangga	5	1.088.000.000	102.000.000	124.000.000	226.000.000	862.000.000
4	Alat Komunikasi	5	383.000.000	52.500.000	36.250.000	88.750.000	294.250.000
5	Komputer Unit	4	400.000.000	80.000.000	48.000.000	128.000.000	272.000.000
6	Peralatan Komputer	4	567.000.000	99.272.000	110.500.000	209.772.000	357.228.000
7	Peralatan Olah Raga	3	52.000.000	22.578.000	7.350.000	29.928.000	22.072.000
	Jumlah		4.150.000.000	687.800.000	630.100.000	1.317.900.000	2.832.100.000
B	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	7.260.000.000	1.604.000.000	159.200.000	1.763.200.000	5.496.800.000
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	9.240.000.000	2.081.200.000	176.700.000	2.257.900.000	6.982.100.000
	Jumlah		16.500.000.000	3.685.200.000	335.900.000	4.021.100.000	12.478.900.000
C	Jaringan, Irigasi, dan Jalan						
1	Jaringan Listrik	40	84.000.000	2.250.000	6.476.000	8.726.000	75.274.000
2	Jaringan Telepon	20	596.000.000	81.750.000	61.524.000	173.524.000	422.476.000
	Jumlah		680.000.000	84.000.000	68.000.000	182.250.000	497.750.000
D	Aset Tetap Lainnya						
1	Barang Bercorak Kesenian	4	150.000.000	44.000.000	42.000.000	86.000.000	64.000.000
2	Buku dan Koleksi Perpustakaan	-	60.000.000	-	-	-	60.000.000
	Jumlah		210.000.000	44.000.000	42.000.000	86.000.000	124.000.000
E	Konstruksi dalam Pengerjaan						
1	KDP Bangunan	-	750.000.000	-	-	-	750.000.000
	Jumlah		750.000.000	-	-	-	750.000.000
F	Aset Lainnya						
1	Aset Tidak Berwujud*	-	400.000.000	27.000.000	54.000.000	81.000.000	319.000.000
2	Aset Lain-lain	-	390.000.000	40.000.000	45.000.000	85.000.000	305.000.000
	Jumlah		790.000.000	67.000.000	99.000.000	166.000.000	624.000.000
	Total		35.180.000.000	4.568.000.000	1.175.000.000	5.773.250.000	29.406.750.000

Lampiran II : Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Kantor Wilayah Akuntansi Istimewa Provinsi Papua
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015

No.	Uraian	Lokasi	No Kontrak	Nilai Kontrak	Persentase Pengerjaan	Nilai Pengerjaan	Ket
1	Gedung Tempat Kerja	KAI Papua	No.25/KWAI/VII/2015	500.000.000	75%	375.000.000	Rupiah Murni
2	Gedung Tempat Kerja	KAI Merauke	No.09/KWAI/VI/2015	500.000.000	75%	375.000.000	Rupiah Murni
	Jumlah			1.000.000.000		750.000.000	